

EVOLUSI TEORI GOVERNANCE: PERBANDINGAN IMPLEMENTASI DI NEGARA MAJU DAN BERKEMBANG

Bella Kharisma Putri¹

bellakharisma49@gmail.com¹

M. Fachri Adnan²

fachri.adnan@gmail.com²

Afriva Khaidir³

af.khaidir@fis.unp³

^{1,2,3}Universitas Negeri Padang

ABSTRACT

This research discusses the evolution and implementation of governance theory in developed and developing countries, with a focus on its impact on government performance, community welfare, and economic competitiveness. A qualitative approach was used to analyze data from literature studies and interviews with government experts. The results show that developed countries often have more effective governance, while developing countries still face challenges in implementing governance principles. In conclusion, differences in context and challenges influence the implementation of governance theory, but the principles of good governance provide significant benefits for both groups of countries.

Keywords: *Evolution, Governance Theory, Developed and Developing Countries.*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas evolusi dan implementasi teori governance di negara maju dan berkembang, dengan fokus pada dampaknya terhadap kinerja pemerintahan, kesejahteraan masyarakat, dan daya saing ekonomi. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menganalisis data dari studi literatur dan wawancara dengan pakar pemerintahan. Hasilnya menunjukkan bahwa negara maju sering memiliki tata kelola yang lebih efektif, sementara negara berkembang masih menghadapi tantangan dalam implementasi prinsip-prinsip governance. Kesimpulannya, perbedaan konteks dan tantangan mempengaruhi implementasi teori governance, namun prinsip-prinsip governance yang baik memberikan manfaat yang signifikan bagi kedua kelompok negara.

Kata Kunci: Evolusi, Teori Governance, Negara Maju dan Berkembang.

PENDAHULUAN

Dalam beberapa dekade terakhir, konsep governance telah mengalami perkembangan signifikan seiring dengan meningkatnya kompleksitas dan dinamika global. Governance, yang pada awalnya seringkali diasosiasikan dengan tata kelola pemerintahan, kini mencakup berbagai aspek pengelolaan dalam sektor publik dan swasta. Transformasi ini mencerminkan upaya untuk menjawab tantangan yang muncul dari perubahan ekonomi, sosial, dan politik yang cepat. Di tengah globalisasi dan integrasi ekonomi, negara maju dan berkembang menghadapi kebutuhan yang mendesak untuk memperbarui dan meningkatkan sistem governance mereka guna mencapai stabilitas, efisiensi, dan transparansi yang lebih baik.

Evolusi teori governance mencakup berbagai pendekatan dan model yang berusaha menjelaskan cara terbaik untuk mengelola sumber daya dan hubungan antar pemangku kepentingan. Model-model ini sering kali berbeda antara negara maju dan berkembang, yang dipengaruhi oleh perbedaan dalam konteks historis, ekonomi, dan sosial. Di negara maju, teori governance cenderung menekankan pada prinsip-prinsip good governance, seperti akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik. Sementara itu, di negara berkembang, fokus sering kali tertuju pada peningkatan kapasitas institusi dan penguatan mekanisme pengawasan

untuk mengatasi tantangan korupsi dan inefisiensi.

Implementasi teori governance di negara maju sering kali ditandai dengan sistem yang lebih terstruktur dan stabil. Negara-negara seperti Amerika Serikat, Jerman, dan Jepang telah mengembangkan mekanisme governance yang kompleks dan efisien, yang mencakup regulasi yang ketat, partisipasi aktif masyarakat, dan pengawasan yang efektif. Contohnya, Jerman dikenal dengan model sosial pasar yang menggabungkan kebijakan ekonomi yang kuat dengan jaminan sosial yang komprehensif, mencerminkan integrasi prinsip governance dalam kebijakan publik.

Sebaliknya, implementasi governance di negara berkembang sering kali menghadapi berbagai hambatan. Keterbatasan sumber daya, kapasitas institusi yang lemah, dan tingkat korupsi yang tinggi merupakan beberapa tantangan utama. Negara-negara seperti India, Nigeria, dan Brazil menunjukkan upaya yang beragam dalam memperkuat governance, dengan hasil yang bervariasi. Misalnya, India telah membuat kemajuan dalam e-governance untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi pelayanan publik, meskipun masih dihadapkan pada tantangan korupsi dan birokrasi yang berbelit-belit.

Perbandingan antara negara maju dan berkembang dalam hal implementasi governance

mengungkapkan perbedaan yang mendasar namun juga beberapa persamaan yang signifikan. Kedua kelompok negara ini berusaha untuk menciptakan sistem yang responsif dan akuntabel, meskipun dengan pendekatan yang disesuaikan dengan konteks masing-masing. Negara maju cenderung memiliki struktur yang lebih matang dan stabil, sedangkan negara berkembang harus mengatasi tantangan yang lebih besar dalam memperkuat institusi dan mekanisme governance mereka.

Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi evolusi teori governance dan membandingkan implementasinya di negara maju dan berkembang. Penelitian ini akan mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi governance di berbagai konteks. Selain itu, penelitian ini juga akan mengevaluasi dampak dari berbagai model governance terhadap kesejahteraan masyarakat dan perkembangan ekonomi di kedua kelompok negara tersebut.

Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Melalui analisis studi kasus dari beberapa negara maju dan berkembang, serta data sekunder dari laporan internasional dan publikasi akademik, penelitian ini akan memberikan gambaran yang komprehensif tentang dinamika governance di berbagai negara. Dengan demikian, penelitian ini

diharapkan dapat memberikan kontribusi penting bagi pengembangan teori dan praktik governance yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Dalam konteks global yang semakin terintegrasi, memahami evolusi teori governance dan implementasinya di berbagai negara menjadi semakin penting. Penelitian ini tidak hanya relevan bagi pembuat kebijakan dan akademisi, tetapi juga bagi praktisi di bidang pemerintahan dan sektor swasta yang terlibat dalam upaya peningkatan governance. Dengan menyajikan analisis yang mendalam dan komparatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru dan rekomendasi yang praktis untuk memperkuat governance di negara maju dan berkembang.

Akhirnya, melalui pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana teori governance berevolusi dan diimplementasikan di berbagai negara, kita dapat mengidentifikasi praktik terbaik dan strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas governance secara global. Ini akan menjadi langkah penting menuju pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan menciptakan masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan sejahtera.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memahami dan menganalisis evolusi teori governance serta implementasinya di negara maju

dan berkembang. Data dikumpulkan melalui studi literatur yang mendalam, termasuk analisis dokumen resmi, laporan internasional, publikasi akademik, dan studi kasus dari beberapa negara terpilih. Studi literatur ini akan memberikan gambaran menyeluruh tentang berbagai model governance dan bagaimana mereka diterapkan di konteks yang berbeda, serta tantangan dan peluang yang dihadapi masing-masing negara dalam mengimplementasikan teori governance.

Selain itu, penelitian ini juga melibatkan wawancara mendalam dengan pakar governance, pembuat kebijakan, dan praktisi di bidang pemerintahan dan sektor swasta di beberapa negara maju dan berkembang. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan wawasan langsung tentang praktik governance, faktor-faktor kunci yang mempengaruhi implementasi, dan dampaknya terhadap kinerja pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat. Data yang diperoleh dari studi literatur dan wawancara akan dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan yang relevan dengan topik penelitian, sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan mendalam tentang evolusi dan implementasi teori governance di berbagai konteks.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perkembangan Teori Governance Dari Masa Ke Masa

Teori governance telah mengalami perkembangan yang signifikan dari masa ke masa, mencerminkan perubahan dalam kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat serta evolusi dalam pemikiran akademik dan praktik pemerintahan. Awalnya, konsep governance lebih fokus pada tata kelola pemerintahan dan administrasi publik, dengan penekanan pada hierarki, birokrasi, dan kepatuhan terhadap aturan. Pendekatan ini sering kali dikaitkan dengan model pemerintahan Weberian, yang menekankan struktur organisasi yang kaku dan kontrol yang ketat untuk memastikan efisiensi dan akuntabilitas.

Seiring berjalannya waktu, terjadi pergeseran menuju konsep governance yang lebih inklusif dan partisipatif. Teori-teori baru seperti New Public Management (NPM) mulai muncul pada akhir abad ke-20, yang mengadvokasi penggunaan praktik-praktik manajerial dari sektor swasta ke sektor publik. NPM menekankan efisiensi, hasil, dan orientasi pada pelayanan, serta mendorong desentralisasi dan otonomi yang lebih besar bagi unit-unit pemerintahan. Pendekatan ini telah diadopsi secara luas di negara-negara maju, seperti Inggris dan Selandia Baru, dengan tujuan meningkatkan responsivitas dan efisiensi dalam pelayanan publik.

Pada saat yang sama, konsep governance juga mulai memperluas

cakupannya untuk mencakup berbagai aktor dan institusi di luar pemerintah. Teori-teori seperti Network Governance dan Collaborative Governance menekankan pentingnya kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk mengatasi masalah-masalah kompleks yang tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah sendiri. Pendekatan ini telah diterapkan di berbagai negara maju dan berkembang, dengan adaptasi sesuai konteks lokal. Di negara-negara Skandinavia, misalnya, model collaborative governance telah berhasil mengintegrasikan berbagai pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan publik.

Di negara berkembang, adaptasi teori governance sering kali menghadapi tantangan yang lebih besar dibandingkan dengan negara maju. Keterbatasan kapasitas institusional, tingkat korupsi yang tinggi, dan keterbatasan sumber daya merupakan beberapa hambatan utama. Namun, beberapa negara berkembang telah menunjukkan keberhasilan dalam mengadaptasi teori-teori governance yang sesuai dengan konteks mereka. Misalnya, konsep e-governance telah digunakan secara efektif di India untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi pelayanan publik, meskipun masih menghadapi tantangan dalam implementasi penuh.

Perkembangan terbaru dalam teori governance mencakup konsep-konsep

seperti Good Governance dan Sustainable Governance. Good Governance menekankan prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan supremasi hukum, yang dianggap penting untuk menciptakan pemerintahan yang efektif dan responsif. Konsep ini telah diadopsi oleh berbagai lembaga internasional seperti Bank Dunia dan PBB, serta menjadi panduan bagi banyak negara dalam reformasi tata kelola mereka. Di negara maju, prinsip-prinsip Good Governance sering kali menjadi standar dalam evaluasi kinerja pemerintahan.

Sementara itu, Sustainable Governance menggabungkan prinsip-prinsip governance dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Pendekatan ini menekankan pentingnya keseimbangan antara pembangunan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Di negara-negara maju, konsep ini telah mendorong kebijakan-kebijakan yang mendukung pembangunan hijau dan inklusif. Di negara berkembang, implementasi Sustainable Governance sering kali menghadapi tantangan tambahan, seperti keterbatasan kapasitas teknis dan finansial, namun tetap menjadi agenda penting dalam upaya mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Keseluruhan evolusi teori governance menunjukkan bahwa tidak ada satu pendekatan yang cocok untuk semua negara. Setiap negara, baik maju

maupun berkembang, perlu menyesuaikan teori-teori governance dengan konteks spesifik mereka, termasuk faktor-faktor historis, budaya, dan politik. Pemahaman mendalam tentang perkembangan dan adaptasi teori governance ini akan membantu pembuat kebijakan dan praktisi dalam merancang dan mengimplementasikan sistem governance yang efektif dan responsif, sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi masing-masing negara.

2. Perbedaan Utama Dalam Implementasi Teori Governance Di Negara Maju Dan Berkembang, Dan Faktor-Faktor Apa Yang Mempengaruhi Keberhasilan Atau Kegagalan Implementasi

Implementasi teori governance di negara maju dan berkembang menunjukkan perbedaan yang signifikan, dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural, politik, dan sosial. Di negara maju, sistem governance cenderung lebih stabil dan terstruktur dengan baik. Negara-negara seperti Amerika Serikat, Jerman, dan Jepang memiliki kapasitas institusional yang kuat, dengan birokrasi yang efisien dan mekanisme pengawasan yang efektif. Dalam konteks ini, governance diterapkan dengan mengedepankan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik yang tinggi, yang berkontribusi pada

pengelolaan sumber daya yang lebih optimal dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Sebaliknya, di negara berkembang, implementasi teori governance sering kali menghadapi tantangan yang lebih kompleks. Keterbatasan sumber daya, kapasitas institusional yang lemah, dan tingkat korupsi yang tinggi menjadi hambatan utama. Negara-negara seperti Nigeria, Indonesia, dan Brazil sering kali mengalami kesulitan dalam menerapkan prinsip-prinsip governance secara efektif. Di negara-negara ini, reformasi governance sering kali terbentur oleh resistensi birokrasi dan politik, serta kurangnya dukungan dari masyarakat yang disebabkan oleh rendahnya tingkat partisipasi dan keterbukaan informasi.

Faktor kapasitas institusional merupakan salah satu pembeda utama antara negara maju dan berkembang dalam implementasi governance. Negara maju biasanya memiliki institusi yang lebih matang dan berfungsi dengan baik, dengan kerangka regulasi yang jelas dan penegakan hukum yang konsisten. Di sisi lain, negara berkembang sering kali menghadapi tantangan dalam membangun dan memperkuat institusi yang dapat mendukung implementasi governance yang efektif. Kapasitas institusional yang lemah sering kali mengakibatkan kebijakan yang tidak konsisten dan tidak efektif, serta kurangnya

mekanisme pengawasan yang independen.

Tingkat korupsi juga memainkan peran penting dalam membedakan implementasi governance antara negara maju dan berkembang. Negara maju cenderung memiliki tingkat korupsi yang lebih rendah berkat sistem hukum yang kuat dan mekanisme pengawasan yang efektif. Di negara berkembang, korupsi sering kali merajalela dan menjadi penghalang utama bagi implementasi governance yang baik. Tingginya tingkat korupsi tidak hanya merusak integritas institusi, tetapi juga menghambat pembangunan ekonomi dan sosial, serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Keterbukaan politik adalah faktor lain yang mempengaruhi implementasi governance. Negara maju umumnya memiliki sistem politik yang lebih terbuka dan demokratis, dengan partisipasi politik yang tinggi dan kebebasan berpendapat yang dijamin. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk berperan aktif dalam proses governance dan menuntut akuntabilitas dari pemerintah. Sebaliknya, di banyak negara berkembang, sistem politik cenderung lebih tertutup dan otoriter, dengan partisipasi politik yang rendah dan kebebasan berpendapat yang terbatas. Kondisi ini menghambat proses governance yang transparan dan partisipatif.

Partisipasi masyarakat juga menjadi faktor kunci dalam keberhasilan implementasi governance. Di negara maju, tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan sangat tinggi. Masyarakat memiliki akses yang luas terhadap informasi dan dapat berpartisipasi secara aktif dalam berbagai forum dan mekanisme konsultasi publik. Di negara berkembang, partisipasi masyarakat sering kali rendah karena keterbatasan akses informasi, kurangnya pendidikan politik, dan budaya apatisisme. Meningkatkan partisipasi masyarakat di negara berkembang merupakan tantangan yang perlu diatasi untuk memperkuat governance.

Kesimpulannya, perbedaan dalam implementasi teori governance di negara maju dan berkembang disebabkan oleh berbagai faktor yang saling terkait, termasuk kapasitas institusional, tingkat korupsi, keterbukaan politik, dan partisipasi masyarakat. Negara maju cenderung lebih sukses dalam menerapkan governance yang efektif berkat institusi yang kuat, rendahnya korupsi, sistem politik yang terbuka, dan partisipasi masyarakat yang tinggi. Sementara itu, negara berkembang harus mengatasi berbagai tantangan untuk mencapai tingkat governance yang setara. Upaya perbaikan institusi, penegakan hukum, peningkatan keterbukaan politik, dan pemberdayaan masyarakat merupakan langkah-langkah penting untuk

memperkuat governance di negara berkembang.

3. Dampak Implementasi Teori Governance terhadap Kinerja Pemerintahan, Kesejahteraan Masyarakat, dan Daya Saing Ekonomi di Negara Maju dan Berkembang

Implementasi teori governance memiliki dampak signifikan terhadap kinerja pemerintahan di negara maju dan berkembang. Di negara maju, penerapan prinsip-prinsip governance seperti efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas sering kali lebih terstruktur dan mapan. Negara-negara seperti Swedia, Kanada, dan Jerman menunjukkan bagaimana tata kelola yang baik dapat meningkatkan efisiensi pemerintahan, mengurangi biaya administrasi, dan meningkatkan pelayanan publik. Sebaliknya, di banyak negara berkembang, penerapan prinsip-prinsip ini masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk birokrasi yang berbelit-belit, kurangnya sumber daya, dan resistensi terhadap perubahan. Namun, ada juga contoh positif seperti Rwanda dan Estonia yang telah berhasil meningkatkan kinerja pemerintahan melalui reformasi governance yang berkelanjutan.

Efisiensi pemerintahan adalah salah satu indikator utama yang terpengaruh oleh implementasi teori governance. Di negara maju, efisiensi sering tercapai melalui penggunaan

teknologi informasi, desentralisasi kekuasaan, dan pengembangan kapasitas pegawai negeri. Misalnya, penggunaan e-governance di negara-negara Skandinavia telah meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan publik, mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan untuk berbagai proses administratif. Di negara berkembang, meskipun beberapa upaya telah dilakukan untuk meningkatkan efisiensi, tantangan seperti korupsi dan kurangnya infrastruktur tetap menjadi penghambat utama.

Transparansi adalah komponen penting lainnya dalam teori governance yang berdampak pada kinerja pemerintahan. Negara maju cenderung memiliki sistem yang lebih terbuka, dengan mekanisme yang kuat untuk pengawasan publik dan partisipasi masyarakat. Transparansi ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah tetapi juga mengurangi peluang korupsi. Di sisi lain, banyak negara berkembang masih berjuang untuk mencapai tingkat transparansi yang memadai. Meskipun demikian, inisiatif seperti Open Government Partnership telah membantu beberapa negara berkembang untuk mulai mengadopsi praktik-praktik transparansi yang lebih baik.

Akuntabilitas dalam pemerintahan juga merupakan hasil penting dari implementasi teori governance. Di negara maju, akuntabilitas dicapai

melalui sistem checks and balances yang ketat, audit independen, dan tanggung jawab yang jelas di antara pejabat publik. Hal ini memastikan bahwa keputusan pemerintah selalu diawasi dan dievaluasi secara tepat. Di negara berkembang, meskipun akuntabilitas sering kali menjadi tantangan karena lemahnya lembaga pengawas dan budaya politik yang kurang mendukung, beberapa negara telah menunjukkan kemajuan yang signifikan. Misalnya, reformasi akuntabilitas di Ghana dan Kenya telah menghasilkan peningkatan yang nyata dalam pengelolaan dana publik dan pengawasan kinerja pejabat.

Dampak dari implementasi teori governance terhadap kesejahteraan masyarakat juga sangat signifikan. Di negara maju, tata kelola yang baik telah berkontribusi pada peningkatan standar hidup, akses yang lebih baik ke layanan kesehatan dan pendidikan, serta pengurangan kemiskinan. Kebijakan yang didasarkan pada prinsip-prinsip governance memastikan bahwa sumber daya publik digunakan secara efektif untuk kesejahteraan masyarakat. Di negara berkembang, meskipun ada tantangan besar, beberapa negara telah berhasil menggunakan prinsip-prinsip governance untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Misalnya, program-program kesejahteraan di Brasil dan India yang didukung oleh kebijakan governance telah membantu

mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup.

Daya saing ekonomi adalah aspek lain yang dipengaruhi oleh implementasi teori governance. Di negara maju, governance yang efektif berkontribusi pada lingkungan bisnis yang kondusif, investasi yang lebih besar, dan inovasi yang berkelanjutan. Hal ini terlihat dalam peringkat tinggi negara-negara maju dalam indeks daya saing global. Di negara berkembang, meningkatkan governance dapat menjadi pendorong utama bagi daya saing ekonomi. Reformasi governance yang bertujuan untuk menciptakan iklim bisnis yang lebih baik, mengurangi hambatan regulasi, dan mendukung investasi asing dapat memberikan dorongan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Akhirnya, perbandingan antara negara maju dan berkembang dalam hal dampak implementasi teori governance menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan dalam konteks dan tantangan, prinsip-prinsip governance yang baik dapat memberikan manfaat besar bagi kedua kelompok negara. Negara maju dapat terus memanfaatkan tata kelola yang baik untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja pemerintahan, kesejahteraan masyarakat, dan daya saing ekonomi. Sementara itu, negara berkembang dapat belajar dari praktik terbaik negara maju sambil menyesuaikan pendekatan mereka dengan konteks lokal untuk mencapai hasil yang serupa. Penelitian

ini menegaskan pentingnya komitmen terhadap prinsip-prinsip governance yang baik sebagai dasar untuk pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Transformasi dan evolusi teori governance memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja pemerintahan, kesejahteraan masyarakat, dan daya saing ekonomi di negara maju dan berkembang. Di negara maju, penerapan prinsip-prinsip governance seperti efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas telah menciptakan sistem pemerintahan yang lebih responsif dan bertanggung jawab, yang pada gilirannya meningkatkan kualitas layanan publik dan standar hidup masyarakat. Sebaliknya, di negara berkembang, meskipun menghadapi berbagai tantangan seperti korupsi, kapasitas institusional yang lemah, dan keterbatasan sumber daya, beberapa negara telah menunjukkan kemajuan yang signifikan melalui reformasi governance yang berkelanjutan.

Perbedaan dalam implementasi teori governance antara negara maju dan berkembang sebagian besar dipengaruhi oleh konteks historis, ekonomi, dan sosial yang unik bagi masing-masing negara. Negara maju sering kali memiliki struktur yang lebih mapan dan sumber daya yang lebih besar untuk mendukung tata kelola yang efektif, sementara negara

berkembang perlu mengatasi hambatan yang lebih besar untuk mencapai tingkat governance yang sama. Namun, dengan adopsi prinsip-prinsip governance yang tepat dan komitmen terhadap reformasi yang berkelanjutan, negara berkembang juga dapat mencapai peningkatan signifikan dalam kinerja pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat mereka.

Penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip governance yang baik, jika diterapkan dengan benar dan disesuaikan dengan konteks lokal, dapat membawa manfaat yang luar biasa bagi semua negara, baik maju maupun berkembang. Pengalaman negara-negara maju memberikan pelajaran berharga bagi negara-negara berkembang, sementara kemajuan yang dicapai oleh beberapa negara berkembang menunjukkan bahwa dengan strategi yang tepat, tantangan dalam implementasi governance dapat diatasi. Oleh karena itu, komitmen terhadap peningkatan governance harus menjadi prioritas bagi semua negara dalam upaya mereka untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Saran

Berikut adalah beberapa saran untuk meningkatkan implementasi teori governance di negara maju dan berkembang:

- a) **Penguatan Kapasitas Institusional:** Negara-negara berkembang perlu fokus pada penguatan kapasitas institusional mereka melalui

- pelatihan, pembangunan keahlian, dan investasi dalam infrastruktur administratif. Ini akan membantu meningkatkan efektivitas pemerintahan dalam menerapkan prinsip-prinsip governance.
- b) Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas: Penting bagi negara-negara untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan mereka melalui reformasi kebijakan, penguatan lembaga pengawasan, dan penerapan praktik-praktik terbaik dalam pengelolaan dana publik.
- c) Pendorong Inovasi dan Teknologi: Penggunaan inovasi dan teknologi, seperti e-governance dan big data analytics, dapat membantu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan pemerintah. Negara-negara harus mendorong adopsi teknologi ini sebagai bagian dari upaya mereka untuk meningkatkan tata kelola.
- d) Penguatan Kerjasama Internasional: Kerjasama internasional dapat membantu negara-negara berkembang dalam memperoleh pengetahuan, sumber daya, dan dukungan teknis yang diperlukan untuk meningkatkan tata kelola mereka. Program-program bantuan dan pertukaran pengetahuan harus didorong

- untuk memfasilitasi transfer pengetahuan dan praktik terbaik.
- e) Komitmen Politik yang Kuat: Akhirnya, komitmen politik yang kuat diperlukan dari pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk melaksanakan reformasi governance. Ini termasuk pembuatan kebijakan yang konsisten, alokasi anggaran yang memadai, dan pengawasan yang ketat terhadap implementasi kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoan, TS, Wowor, HF, & Karouw, S (2017). Analisa Tingkat Kematangan Teknologi Informasi Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Manado Menggunakan Framework COBIT 5 Domain Evaluate *Jurnal Teknik Informatika*, Ejournal.Unsrat.Ac.Id, <https://Ejournal.Unsrat.Ac.Id/Index.Php/Informatika/Article/View/15627>
- Ngambut, K (2023). Kerangka Kerja Collaborative Governance: Tantangan Implementasi Dalam Situasi Krisis Pandemi COVID19. *Jurnal Administrasi Dan Demokrasi* ..., Ejournal.Undana.Ac.Id, <https://Ejournal.Undana.Ac.Id/JAD/Article/View/11882>
- Paselle, E, Prakoso, CT, & Susilowati, T (2021). Nilai-Nilai Demokrasi Dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik Di Era Pandemi Covid-19 Di Kota Samarinda. *Moderat: Jurnal*

- Ilmiah Ilmu ...*, Ojs.Unigal.Ac.Id,
<https://Ojs.Unigal.Ac.Id/Index.php/Modrat/Article/Download/2549/1944>
- Pohan, S, Tobing, YPL, & Mazuda, A (2024). TANTANGAN IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE MELALUI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA. *Jurnal Salome: Multidisipliner ...*, Salome.Joln.Org, <http://Salome.Joln.Org/Index.php/4/Article/View/52>
- Hariance, R (2020). Aksi Kolektif Petani Dalam Koperasi Untuk Agribisnis Berkelanjutan. *Agrifo: Jurnal Agribisnis Universitas Malikussaleh*, Ojs.Unimal.Ac.Id, <https://Ojs.Unimal.Ac.Id/Agrifo/Article/View/2725>
- Harahap, IH (2019). Analisis Gaya Kepemimpinan Lee Kuan Yew Dalam Mengantarkan Singapura Menjadi Negara Maju. *Journal Of Entrepreneurship, Management And ...*, Journal.Bakrie.Ac.Id, <https://Journal.Bakrie.Ac.Id/Index.php/JEMI/Article/View/1841>
- Kertati, I (2021). Analisis Indeks Pembangunan Gender (Ipg) Dan Indeks Pemberdayaan Gender (Idg) Kota Surakarta. *Public Service And Governance Journal*, Jurnal.Untagsmg.Ac.Id, <http://Jurnal.Untagsmg.Ac.Id/Index.php/Psgj/Article/View/1960>
- Kuntoro, S, & Suseno, G (2024). ... And Solutions In The Digitalization Of Public Services In Developing Countries: Hambatan Dan Solusi Dalam Digitalisasi Layanan Publik Di Negara Berkembang. *Al-Mahkamah: Jurnal ...*, Journal.Syamilahpublishing.Com, <https://Journal.Syamilahpublishing.Com/Index.php/Mahkamah/Article/View/52>
- WANTU, SM (2012). Anomali Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Tingkat Lokal Dalam Perspektif Ekonomi Politik Sastro M. Wantu. *Jurnal Pelangi Ilmu*, Ejurnal.Ung.Ac.Id, <https://Ejurnal.Ung.Ac.Id/Index.php/JPI/Article/View/1103>
- Fauzan, N (2023). BAGAIMANA ADOPSI MEDIA SOSIAL MENINGKATKAN KINERJA USAHA KECIL DAN MENENGAH: ANALISIS BIBLIOMETRIK 2013-2023. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis (Performa)*, Journals.Unisba.Ac.Id, <https://Journals.Unisba.Ac.Id/Index.php/Performa/Article/View/3072>
- Hadilinatih, B (2018). Collaborative Governance Dalam Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Enersia Publika: Energi, Sosial, Dan ...*, Ejurnal.Up45.Ac.Id, https://Ejurnal.Up45.Ac.Id/Index.php/Jurnal_Enersia_Publika/Article/View/602
- Suprijanto, A (2011). Dampak Globalisasi Ekonomi Terhadap Perekonomian Indonesia. *CIVIS: J*

urnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Pendidikan
..., Journal.Upgris.Ac.Id,
[Http://Journal.Upgris.Ac.Id/Index.php/Civis/Article/View/592](http://Journal.Upgris.Ac.Id/Index.php/Civis/Article/View/592)

Wirasenjaya, AM (2013). Disharmoni Negara Dan Pasar Dalam Rezim Neoliberal. *Jurnal Hubungan Internasional*, Journal.Umy.Ac.Id, [Https://Journal.Umy.Ac.Id/Index.php/Jhi/Article/View/305](https://Journal.Umy.Ac.Id/Index.php/Jhi/Article/View/305)

Hartana, M (2015). Efektivitas Penerapan E-Government Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Pemerintahan Daerah. *Jurnal Perhimpunan Mahasiswa Hukum*

Indonesia, Academia.Edu,
[Https://Www.Academia.Edu/Download/64644296/03_Isi_Mugi_Hartana_\(Permahi\).Pdf](https://Www.Academia.Edu/Download/64644296/03_Isi_Mugi_Hartana_(Permahi).Pdf)

Kartika, E, & Aulia, D (2023). ... E-GOVERNMENT PADA HUBUNGAN ICT DEVELOPMENT DAN MOBILE PAYMENT DENGAN LEVEL KORUPSI DI NEGARA MAJU DAN NEGARA BERKEMBANG. *Jurnal Maneksi (Management Ekonomi* ..., Ejournal-Polnam.Ac.Id, [Https://Ejournal-Polnam.Ac.Id/Index.php/Jurnalmaneksi/Article/View/1312](https://Ejournal-Polnam.Ac.Id/Index.php/Jurnalmaneksi/Article/View/1312)